



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PELINDUNGAN ANAK DARI DAMPAK NEGATIF MEDIA SOSIAL

Rohani Budi Prihatin
Analisis Legislatif Ahli Madya
rohani.prihatin@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Saat ini, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana meregulasi pembatasan anak bermain media sosial (medsos). Aturan tersebut antara lain dengan menentukan batas usia yang tepat bagi anak-anak dalam mengakses medsos dan platform digital diharapkan beroperasi dengan lebih bertanggung jawab. Selain pakar pendidikan dan pemerhati anak, Komdigi juga akan memanggil pengelola platform medsos antara lain Facebook, Instagram, TikTok hingga X atau Twitter.

Rencana Komdigi ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, terutama yang memperhatikan dampak medsos bagi tumbuh kembang anak. Dalam jangka pendek, medsos menciptakan situasi anak-anak yang kurang bergaul dan mudah cemas. Dalam jangka panjang, kecanduan medsos pada anak dapat menyebabkan krisis pembelajaran sosial dan kesehatan mental pada anak. Paparan medsos yang berlebihan akan melahirkan depresi, kecemasan, dan perasaan rendah diri. Hal ini biasanya diakibatkan si anak membandingkan diri mereka dengan orang lain yang tampaknya lebih sukses atau bahagia dan pada akhirnya meruntuhkan harga diri mereka. Ada kecenderungan anak mencari perhatian publik dengan cara yang tidak lazim lewat unggahan mereka di medsos. Bahkan berdasarkan data dari National Center for Missing and Exploited (NCMEC) tercatat bahwa konten pornografi yang melibatkan anak Indonesia dalam empat tahun terakhir mencapai 5.566.015 kasus. Jumlah ini merupakan yang terbanyak ke-4 di dunia dan tertinggi ke-2 di ASEAN.

Untuk itu, perlu upaya yang ketat agar anak-anak Indonesia terhindar dari kecanduan medsos dan dampak negatifnya. Upaya tersebut dapat dimulai dari sisi tanggung jawab pengelola platform medsos. Mereka inilah yang secara sadar menciptakan program-program yang bersifat adiktif dalam bentuk algoritma sehingga memicu anak-anak alami kecanduan. Dampaknya akan terlalu banyak waktu anak menggunakan medsos sehingga mengurangi kesempatan anak untuk mengembangkan keterampilan sosial yang penting seperti komunikasi tatap muka dan empati. Di samping itu, penggunaan yang tidak dikontrol, dipastikan akan mengganggu jam belajar dan jam tidur anak. Oleh karena itu, perlu upaya perlindungan anak yang menyeluruh dari dampak negatif medsos yang dimulai dari level keluarga maupun pemerintah.

Pada level keluarga, ada berbagai cara mencegah atau mengatasi dampak negatif medsos bagi anak antara lain dengan melakukan edukasi dan pengawasan, pembatasan waktu penggunaan gadget, menerapkan aplikasi *parental control*, membangun komunikasi terbuka orang tua dengan anak, orang tua memberikan contoh baik dalam akses medsos, serta ortu mendorong anak untuk terlibat aktivitas *offline* seperti olahraga, seni, atau kegiatan sosial lainnya yang dapat membantu mengembangkan keterampilan dan minat mereka.

Pada level pemerintah, ada dua pilihan kebijakan yang bisa dibuat yakni melarang sepenuhnya atau pembatasan dengan sejumlah ketentuan. Australia sejauh ini merupakan negara yang

menerapkan aturan sangat tegas, di mana anak berusia di bawah 16 tahun dilarang menggunakan medsos. Sementara itu, pilihan kedua adalah pengaturan berbasis kategori usia anak. Usia 7 tahun ke bawah, disarankan untuk tidak diperkenalkan (dilarang) medsos karena pada umur tersebut masih kesulitan membedakan antara realitas dan fantasi. Sementara pada usia 7-11 tahun, anak mulai bisa diperkenalkan dengan pengawasan ketat dan batasan yang jelas seperti hanya menggunakan platform yang aman dan sesuai usia. Pada usia ini, orang tua diharapkan menerapkan kontrol langsung dengan membatasi waktu layar (*screen time*) antara 1-2 jam per hari dan menggunakan aplikasi kontrol dari orang tua. Sementara untuk anak 12 tahun ke atas, orang tua diharapkan mengajarkan literasi digital secara mandiri tetapi tetap dalam pengawasan orang tua.

Hal lain yang tak kalah penting adalah koordinasi antar kelembagaan pemerintah dalam mewujudkan upaya perlindungan anak ini. Oleh karena lintas bidang, penanganan akan melibatkan Komdigi yang nantinya harus berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Atensi DPR

Dampak negatif medsos saat ini sudah sangat mengkhawatirkan karena banyaknya konten yang tidak mendidik, tidak senonoh, dan kekerasan yang sangat mudah diakses oleh anak-anak. Untuk itu diperlukan langkah tegas dan strategis agar ruang digital menjadi aman dan ramah anak. Sehubungan dengan upaya tersebut, Komisi VIII DPR RI perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- memastikan KemenPPPA dan KPAI untuk melakukan upaya efektif dalam mengurangi dan mencegah terjadinya dampak negatif penggunaan medsos di kalangan anak dalam bentuk kecanduan, praktik *cyberbullying*, paparan konten negatif, masalah kesehatan mental, dan penurunan keterampilan sosial.
- memperkuat regulasi, meningkatkan pengawasan serta menindak tegas konten berbahaya agar tercipta medsos yang ramah anak. Mengingat luasnya cakupan pemangku kepentingan dalam mewujudkan medsos ramah anak, maka diperlukan koordinasi yang konkret sebagai upaya perlindungan anak Indonesia.

Sumber

detik.com, 4 Februari 2025;
kompas.com, 8 Februari 2025;
kompas.id, 16 Januari 2025;
republika.co.id, 15 Januari 2025; dan
tempo.co, 12 Februari 2024 dan 5 Februari 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasatiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making